

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DANA DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Sem Gagah Rianto
NPP. 29.1102

*Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Keuangan Publik*

Email: sgagahrianto@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): the author focuses on village areas in East Kotawaringin Regency which are still unable to manage village finances properly due to obstacles in the village itself such as lack of knowledge and other obstacles, especially the Covid-19 pandemic that is still hitting Indonesian territory now. **Objective:** The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of guidance in village financial management carried out at the DPMD of East Kotawaringin Regency, then look for obstacles and also the efforts made to overcome these obstacles. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the Effectiveness of Guidance by the Kotim Regency Community and Village Empowerment Service has not run effectively, seeing that the village financial management is still lacking in terms of the ability of the village itself in the Village Fund, the ineffective use of the budget is caused by its implementation which also not optimal. This happens because the village itself and the DPMD Kotim have not been able to provide the best effort caused by internal and external factors. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the Effectiveness of Guidance by the Community and Village Empowerment Office of Kotim Regency has not run effectively because there are several obstacles that affect it.

Keywords: *Village Fund, Financial Development, Budget Absorption*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): penulis fokus pada wilayah desa yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum mampu untuk mengelola keuangan desa dengan baik dikarenakan kendala di desa sendiri seperti pengetahuan yang masih kurang dan kendala lainnya terlebih adanya pandemi Covid-19 yang masih melanda wilayah Indonesia sekarang. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan di DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur, lalu mencari kendala dan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pembinaan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotim belum berjalan dengan efektif melihat bahwa pada pengelolaan keuangan Desa masih kurang terkait kemampuan dari desa sendiri dalam Dana Desa, Pemanfaatan anggaran yang belum efektif disebabkan oleh pelaksanaannya yang juga belum optimal. Hal ini terjadi karena desa sendiri dan DPMD Kotim yang belum mampu memberikan usaha terbaik yang disebabkan oleh factor internal maupun eksternal. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah Efektivitas Pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotim belum berjalan dengan efektif dikarenakan ada beberapa hambatan yang mempengaruhinya.

Kata kunci: *Dana Desa, Pembinaan Keuangan, Penyerapan Anggaran*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urusan dan kewenangan yang menjadi hak bagi pemerintahan yang ada di desa sangat beragam. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan dan juga pertanggungjawaban dari dana dan anggaran yang dialokasikan bagi pelaksanaan pemerintahan di desa yang menjadi beban pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat yang berada di atas pemerintahan desa. Data anggaran dan realisasi tentang dana desa Di Kabupaten Kotawaringin timur, dapat dilihat bahwa tingkat realisasi dari alokasi anggaran terkait dana desa dalam pelaksanaannya sudah dapat terserap dengan baik yang ditunjukkan dengan angka pemenuhan pelaksanaan yang berada di atas angka 97,5% pada 2018 dan ada di atas 99% 2019 dan 2020. Tingginya persentase realisasi anggaran dana desa menjadi permasalahan apabila dibandingkan dengan klasifikasi desa yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih banyak desa yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan desa yang berkembang yang hanya berjumlah 15 dari 168 desa yang terbagi kedalam 17 Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur dengan angka hanya 6 sebesar 8,93%. Angka yang sangat rendah tersebut memerlukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dari terkait laporan realisasi anggaran di desa. Masih banyaknya desa tertinggal dan sangat tertinggal, menjadi kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Agar terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat desa dan untuk mewujudkan fungsi dari dana desa yang optimal, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memberikan pembinaan kepada Camat dan unsur Pemerintah Desa terkait pengelolaan keuangan desa, yang ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disebutkan bahwa salah satu tugas DPMD adalah memberikan pembinaan secara kelembagaan dalam banyak aspek dan bidang serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penelitian ini direncanakan akan membahas permasalahan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ada di Pemerintahan Desa yang peneliti sudah fokuskan pada bagaimana penyerapan anggaran dana desa yang sudah dialokasikan dan diserahkan kepada pemerintahan desa yang ada di Kotawaringin Timur ini dapat optimal dan memberikan hasil yang memang berdampak dan mensejahterakan masyarakat desa yang dalam pelaksanaannya juga mengalami hambatan berupa

Pandemi Covid-19 selama 2020. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diwakili oleh DPMD selaku satuan kerja pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan mengurus segala macam urusan dan hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur tentu telah mencanangkan program dan juga kegiatan pembinaan kepada seluruh Camat dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya untuk memaksimalkan angka penyerapan terhadap anggaran dana desa yang sudah dialokasikan dan didistribusikan kepada tiap – tiap pemerintahan desa dalam rangka menjalankan pemerintahan dan pelayanan yang optimal di desa sekalipun sedang terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan permasalahan yang tertera diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan 8 Desa terhadap Penyerapan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur”**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Data anggaran dan realisasi tentang dana desa Di Kabupaten Kotawaringin timur, dapat dilihat bahwa tingkat realisasi dari alokasi anggaran terkait dana desa dalam pelaksanaannya sudah dapat terserap dengan baik yang ditunjukkan dengan angka pemenuhan pelaksanaan yang berada di atas angka 97,5% pada 2018 dan ada di atas 99% 2019 dan 2020. Tingginya persentase realisasi anggaran dana desa menjadi permasalahan apabila dibandingkan dengan klasifikasi desa yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih banyak desa yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan desa yang berkembang yang hanya berjumlah 15 dari 168 desa yang terbagi kedalam 17 Kecamatan se- Kabupaten Kotawaringin Timur dengan angka hanya 6 sebesar 8,93%. Terlihat sangat jelas bahwa kesenjangan masalah yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah tingkat penyerapan anggaran yang tinggi hingga mencapai 90-an persen ternyata tidak menunjukkan hasil yang baik juga dari penyerapan dana tersebut terbukti dari data yang menunjukkan jumlah desa yang tertinggal dan sangat tertinggal masih sangat tinggi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang tentunya memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu dari sisi fokus penelitian maupun dari objek yang diteliti. Penelitian yang pertama yang dijadikan acuan adalah penelitian yang dilakukan (**Syaiful, 2019**) yang berjudul Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Pada Desa Batuan Kecamatan Batuan) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di desa Batuan Kecamatan Batuan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Tahap pelaksanaan telah sesuai dengan Perbup Sumenep No. 77 Tahun 2017. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Lisnawati, 2018**) yang berjudul Analisis Efektivitas Penyerapan Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Desa Grimukti Provinsi Jawa Barat dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyerapan Dana Desa dalam pengelolaan anggaran berpengaruh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dana Desa sebagai sumber dari pembangunan mampu dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan infrastruktur di desa Grimukti. Penelitian yang ke tiga adalah penelitian yang dilakukan oleh

(Nurllinda, 2018) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan metode penelitian Pengelolaan keuangan desa Lestari Indah Kecamatan Siantar, Sumatera Utara sudah baik, dokumen lengkap dan sesuai dengan aturan. Pengelolaan yang baik mencakup segala tahap baik dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Puspita, 2021) yang berjudul Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Mulyadi, 2019) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kota Sawahlunto dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan perencanaan dan peruntukan desa sebagaimana tertuang dalam RPJM dan RKPDesa Desa mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 dan pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang besarnya anggaran desa. Efektivitas penyerapan dana desa yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pencapaian realisasi keuangan desa mencapai 97,22%-100%.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa kebaruan yang ada pada penelitian yang akan dilakukan yaitu dari lokasi penelitian yang dilakukan. Disebut dengan kebaruan karena lokasi penelitian menunjukkan kompleksitas masalah yang berbeda-beda dan juga cara penyelesaian yang berbeda sesuai dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian dengan lokasi yang berbeda – beda seperti penelitian (Syaiful, 2019) yang dilaksanakan di Desa Batuan Kecamatan Batuan, lalu ada penelitian (Lisnawati, 2018) yang melaksanakan penelitian di Jawa Barat, selanjutnya penelitian (Nurllinda, 2018) yang berlokasi di Sumatera Utara, ada juga penelitian (Puspita, 2021) dengan lokasinya di Kabupaten Bondowoso, dan terakhir adalah penelitian (Mulyadi, 2019) yang melaksanakan penelitian di Kota Sawahlunto. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kabupaten Kotawaringin Timur provinsi Kalimantan Tengah.

Selain kebaruan terkait dengan lokasi penelitian, kebaruan penelitian yang akan dilaksanakan ini juga ada kebaruan dibandingkan dengan penelitian (Puspita, 2021) yang menggunakan metode mix yaitu kualitatif dan juga kuantitatif sehingga akan berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian kualitatif saja.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektifitas pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan di DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur, lalu mencari kendala dan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Tabanan, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang diambil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh S.P Siagian (2008) Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

a) Kejelasan Tujuan, kejelasan tujuan yang hendak dicapai dari DPMD Kotawaringin Timur menemui kejelasan yang tepat. Yaitu melalui pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat mempercepat peningkatan dari penyerapan anggaran dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Kotawaringin Timur. **b) Perencanaan yang matang**, DPMD telah merencanakan dengan baik langkah-langkah sebelum melaksanakan pembinaan yang akan dilaksanakan langsung maupun tidak langsung. **c) Penyusunan Program Yang Tepat**, ada beberapa program yang telah dicanangkan yaitu Melaksanakan rapat bersama dengan seluruh kepala desa, Monitoring bersama dengan perangkat daerah lainnya (inspektorat, pols ek, kejaksaan) Didampingi camat, dan PMD aktif. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat menemukan program yang tepat bagi Pemda terkait. **d) Tersedianya Sarana dan Prasarana**, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas PMD Kotim, “Untuk sarana dan prasarana pada DPMD Kotim mungkin sudah cukup memadai akan tetapi masih terkendala untuk desa yang berada jauh dipedalaman, dikarenakan mobilisasi yang terkendala baik jarak maupun track yang sulit ditempuh. **e) Pelaksanaan yang efektif dan efisien**, Dalam pembinaan desa yang jumlahnya cukup banyak tentu saja diperlukannya ketepatan penentuan pemilih waktu dan tujuan, oleh sebab itu pemilihan prioritas juga menjadi salah satu faktor untuk keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan. Pembagian tugas dari pegawai DPMD Kotim juga diperlukan karena kekurangan tenaga kerja. **f) Sistem Pengawasan dan pengendalian yang mendidik**, Pengawasan dan pengendalian dilakukan

dengan koordinasi bersama Inspektorat sebagai auditor mulai dari proses penganggaran hingga pelaporan. Dalam pengendalian DPMD Kotim juga berhubungan dengan Camat yang paling dekat dengan Desa. Pelaksanaan pembinaan yang saling beerkoordinasi merupakan contoh yang baik bagi Desa, sehingga menjadi harapan bagi desa mampu memberikan kinerja terbaik juga.

3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan

Dalam mendapatkan hasil yang maksimal dalam peningkatan penyerapan anggaran Dana Desa melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kotawaringin Timur, pada pelaksanaan pembinaan tentu saja menghadapi berbagai kendala. Berikut beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembinaan pengelolaan keuangan desa : 1. Kekurangan Tenaga Kerja, jumlah perangkat desa yang setiap harinya membutuhkan bantuan dari DPMD sendiri tidak sebanding dengan jumlah pegawai di DPMD Kotim, Sehingga seringkali terjadi penumpukan Perangkat Desa sebagai klien yang membuat pegawai kewalahan dan keteteran dalam menghadapi orang banyak. Hal ini menjadi masalah internal bagi DPMD Kotim. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa, Kurangnya pengetahuan dalam berbagai aspek membuat perangkat desa juga kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa. Mobilisasi Akses jalan merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan, menjadi penghubung untuk dapat bergerak dari satu tempat ketempat yang lain. Di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masih banyak jalan menuju Desa yang masih sulit untuk melewati darat, bahkan ada desa yang diperlukannya menyusuri sungai agar dapat sampai ke desa tersebut.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Pembinaan dan Penyerapan Anggaran

Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan penyerapan anggaran Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur : Optimalisasi Tenaga Ahli Desa Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Tenaga Ahli yang sudah ada, apabila perlu adanya mutasi dan penambahan pegawai. Lalu dengan cara Peningkatan Mutu Perangkat Desa Kurangnya pengetahuan dalam mengelola keuangan desa dapat menyebabkan penyelewengan Dana Desa yang terbilang besar. Perlunya ada penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada perangkat desa agar mengerti dan paham akan kerugian yang bisa disebabkan dari korupsi. Selanjutnya, Melengkapi Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana merupakan faktor pendukung untuk keberhasilan dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan terakhir Meningkatkan Koordinasi untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Peraturan Bupati No 39 Tahun 2016 mengenai Keuangan Desa yang didalamnya tercantum lembaga dan perangkat daerah berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pengelolaan keuangan Desa.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian ini, hal yang sangat perlu diperhatikan dan didiskusikan pada penelitian ini adalah jumlah sumberdaya dan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh aparatur di desa kabupaten Kotawaringin timur masih kurang memadai. Sebenarnya sebelum melakukan pembinaan hal yang paling penting untuk dilakukan adalah peningkatan kualitas SDm yang dimiliki oleh pembina itu sendiri, karena ketika pembina belum cukup berkualitas maka bisa dibayangkan bagaimana hasil

binaan yang akan dihasilnya. Disini terungkap juga kenapa dana desa terserap begitu tinggi padahal masih banyak desa yang tergolong tidak baik.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Efektivitas Pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotim belum berjalan dengan efektif melihat bahwa pada pengelolaan keuangan Desa masih kurang terkait kemampuan dari desa sendiri dalam Dana Desa, Pemanfaatan anggaran yang belum efektif disebabkan oleh pelaksanaannya yang juga belum optimal. Hal ini terjadi karena desa sendiri dan DPMD Kotim yang belum mampu memberikan usaha terbaik yang disebabkan oleh factor internal maupun eksternal. Adapun Faktor penghambatnya adalah Keterbatasan kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dikarenakan masih kekurangan tenaga ahli dalam menangani kasus keuangan Desa dan rendahnya SDM yang dimiliki oleh masyarakat desa.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi adalah Pertama, Dinas PMD Kotawaringin Timur selalu melakukan pendampingan dan komunikasi dengan perangkat-perangkat desa dan pendamping desa. Kedua, Dinas PMD Kotim mengarahkan kepada desa untuk melakukan musyawarah desa dan Dinas PMD sendiri menyelenggarakan rapat setiap awal bulan yang diikuti seluruh Kepala Desa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Timur kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Syaiful. 2019. *Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Pada Desa Batuan Kecamatan Batuan)*. Jawa Barat

Lisnawati. 2018. *Analisis Efektivitas Penyerapan Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Desa Grimukti Provinsi Jawa Barat*. Jawa Barat

Nurllinda. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Sumatera Utara

Puspita. 2021. *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*. Jawa Timur

Mulyadi. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kota Sawahlunto*. Sumatera Barat

